RENCANA KERJA TAHUN 2025

RENJA







Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nunukan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan secara terencana dan terpadu agar dapat diimplementasikan secara efektif,efisien dan tepat sasaran. Dan salah satu cara untuk mendukung pembangunan secara terencana adalah dengan menyusun rencana kerja (Renja) di tingkat SKPD, termasuk pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daearah dan rencana kerja pemerintah daerah, Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (Satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renja DSP3A) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 pada dasarnya memuat rencana kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renja 2025 melalui serangkaian langkah sebagai berikut:

1. Pengolahan Data dan Informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Perumusan Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telahaan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2018;
6. Perumusan Tujuan dan Sasaran;
7. Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musrembang tingkat kecamatan dan kabupaten, maupun masukan baik lisan maupun tertulis dari masyarakat;

8. Identifikasi kebijakan serta Program Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Perumusan program dan kegiatan prioritas;
10. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
11. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
12. Pembahasan forum SKPD; dan
13. Pembangunan dokumen racangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta kebijakan lainnya yang bersifat wajib dan atau urgen

- **Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan**

  Dokumen Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah salah satu dokumen perencanaan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, yang memuat rencana pembangunan yang terkait urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Rencana program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja DPK Tahun 2024 akan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

- **Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Strategis (Renstra) DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026**

  Penyusunan Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Renstra DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Maka penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Renstra DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten.

- **Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Strategis (Renstra) DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026**

  Akumulasi dari pagu indikatif yang terdapat pada seluruh Renja SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 termasuk Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025 akan menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Dokumen KUA-PPAS ini lah nantinya yang akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, dan yang teknis penyusunan menjadi tanggungjawab perangkat daerah masing-masing selaku perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

2. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).

9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Daerah;

12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati nunukan nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, dan fungsi serta tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Kerja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur peniaian Kinerja DSP3A Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025

Sedangkan tujuan disusunnya rancangan Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025, Yaitu :

1. Merumuskan Program dan Kegiatan Pembangunan DSP3A Kabupaten Nunukan selama Tahun 2025;
2. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
3. Terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pelayanan publik;
4. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 di Lingkungan DSP3A Kabupaten Nunukan.
5. Sebagai bahan penyusuan Kinerja Laporan (LKJIP) DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 terdiri dari 5 (Lima) Bab, dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD (Tabel TC.29)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD (T-C.30)
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Review Rancangan Awal RKPD (T-C.31)
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (T-C.32)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Agar mudah mengidentifikasikan tahun mana yang dimaksud dengan tahun lalu, tahun berjalan, atau tiga tahun sebelum rencana, berikut ini diuraikan ilustrasi menggunakan angka tahun.

Misalnya untuk Penyusunan Renja DSP3A Tahun 2024, maka :

Tahun n = Tahun yang direncanakan,yaitu tahun 2024

Tahun n-1 = Tahun berjalan, yaitu tahun 2024

Tahun n-2 = Tahun lalu,yaitu tahun 2022

Dari ilustrasi di atas maka review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang dimaksud adalah review terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada renja Tahun Anggaran 2022 (n-2), sedangkan perkiraan capaian tahun berjalan adalah perkiraan capaian kinerja pada tahun 2024 (n-1)

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang akan direview terhadap Renja Tahun 2025 antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut akan disajikan **tabel T-C. 27** Trencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DSP3A Kab. Nunukan dan Pencapaian Renstra DSP3A mulai dari tahun 2022 :

Tabel T-C.27

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Internal Penanggung	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										8.103.157.424,00										
										8.103.157.424,70										
BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								8.014.225.239		8.103.157.425		8.104.810.044		8.406.550.350		8.731.883.194		41.360.626.252		
	Meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP			Nilai Sakip	B	B	5.899.454.719	B	6.048.124.064	BB	6.127.434.144	BB	6.281.724.254	A	6.445.404.101	A	30.802.141.282		
								5.899.454.719	100 Persen	6.048.124.064	100 Persen	6.127.434.144	100 Persen	6.281.724.254	100 Persen	6.445.404.101				
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas	Persen	85	85	5.899.454.719	85	6.048.124.064	90	6.127.434.144	90	6.281.724.254	90	6.445.404.101	90	30.802.141.282		
			Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	dokumen	6	6	32.500.000	6	35.750.000	6	39.325.000	6	43.257.500	6	47.583.250	6	198.415.750		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	23.000.000	5	25.300.000	5	27.830.000	5	30.613.000	5	33.674.300	25	140.417.300		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	9.500.000	2	10.450.000	2	11.495.000	2	12.644.500	2	13.908.950	10	57.998.450		
			Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	Jumlah Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	5.188.118.009	12	5.265.653.683	12	5.266.716.725	12	5.334.935.093	12	5.403.936.024	12	26.459.359.534		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	32	5.188.118.009	32	5.265.653.683	32	5.266.716.725	32	5.334.935.093	32	5.403.936.024	32	26.459.359.534		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Unit	6	6	175.626.673	6	193.189.340	6	212.508.274	6	233.759.102	6	257.135.012	6	1.072.218.401		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	23.627.006	8	25.989.707	9	28.588.677	10	31.447.545	11	34.592.299	45	144.245.234		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	14.300.000	4	15.730.000	4	17.303.000	4	19.033.300	4	20.936.630	20	87.302.930		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	5.699.667	2	6.269.634	2	6.896.597	2	7.586.257	2	8.344.882	13	34.797.037		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	132.000.000	1	145.200.000	1	159.720.000	1	175.692.000	1	193.261.200	5	805.873.200		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Unit	6	6	447.210.037	6	491.931.041	6	541.124.145	6	595.236.559	6	654.760.215	6	2.730.261.997		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.849.891	1	3.134.880	1	3.448.368	1	3.793.205	1	4.172.525,41	5	17.398.870		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	17.099.346	3	18.809.281	3	20.690.209	3	22.759.230	3	25.035.152	15	104.393.217		
			pengeyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5	5.000.000	5	5.500.000	5	6.050.000	5	6.655.000	5	7.320.500	25	30.525.500		
			Penyediaan jasa Pelayananan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	422.260.800	1	464.486.880	1	510.935.568	1	562.029.125	1	618.232.037	1	2.577.944.410		
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	Unit	11	11	56.000.000	11	61.600.000	12	67.760.000	12	74.536.000	12	81.989.600	58	341.885.600		
			penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan ,dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	47.000.000	10	51.700.000	10	56.870.000	10	62.557.000	10	68.812.700	50	286.939.700		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	9.000.000	1	9.900.000	2	10.890.000	2	11.979.000	2	13.176.900	8	54.945.900		

Meningkatnya Kualitas Penanganan dan Pelayanan PPKS		**Persentase PPKS yang tertangani**			**Persen**	**NA**	**75,00**	**1.732.977.601,00**	**75,00**	**1.692.254.133,40**	**75,00**	**1.606.379.606,61**	**80**	**1.745.496.337,77**	**80**	**1.898.524.744,65**	**80**	**8.675.632.423,43**		
	Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS	**Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial**			**Persen**	**NA**	**36**	**126.038.430,00**	**38**	**95.142.273,00**	**40**	**99.656.500,00**	**42**	**104.622.150,00**	**45**	**110.084.365,00**	**45**	**535.543.718,00**		
			Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase sumberdaya kesejahteraan yang diberdayakan**	**Persen**	**50**	**50**	**35.000.000,00**	**50**	**50.000.000,00**	**50**	**50.000.000,00**	**50**	**50.000.000,00**	**50**	**50.000.000,00**	**50**	**235.000.000,00**		
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang diberdayakan	KAT	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	45.000.000,00		
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10	10	5.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	45.000.000,00		
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	Rekomendasi	NA	3	5.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	23	45.000.000,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	NA	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	45.000.000		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	Orang	21	21	25.000.000,00	21	30.000.000,00	21	30.000.000,00	21	30.000.000,00	21	30.000.000,00	21	145.000.000,00		
			Peningkatan Kenampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	11	11	10.000.000,00	11	15.000.000,00	11	15.000.000,00	11	15.000.000,00	12	15.000.000,00	56	70.000.000		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	21	25.000.000		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	25.000.000		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	25.000.000		
								91.038.430	67 %	45.142.273	76 %	49.656.500	83 %	54.622.150	90 %	60.084.365				
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Presentase pengelolaan taman makam pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara**	**Persen**	**75**	**80**	**91.038.430**	**80**	**45.142.273**	**80**	**49.656.500**	**80**	**54.622.150**	**80**	**60.084.365**	**80**	**300.543.718**		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Kawasan	1	1	91.038.430	67 %	45.142.273	76 %	49.656.500	83 %	54.622.150	90 %	60.084.365	1	300.543.718		
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	51.038.430	1	25.142.273	1	24.656.500	1	34.622.150	1	30.084.365	1	165.543.718		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1	40.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	135.000.000		
	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS	**Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial**			**Persen**	**NA**	**80%**	**935.512.177**	**80%**	**858.542.167**	**85%**	**927.875.156**	**85%**	**1.004.141.443**	**90%**	**1.088.034.360**	**90%**	**4.814.105.303**		
								90.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000				

			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani**	**Persen**	**100**	**100**	**90.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100,00**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**290.000.000**		
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Orang	2	10	90.000.000	10	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	14	50.000.000	58	290.000.000		
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	10	90.000.000	100 %	50.000.000	100 % 72,12	50.000.000	100 %	50.000.000	100 % 100	50.000.000	14	**290.000.000**		
				0				845.512.177		808.542.167	Persen	877.875.156	86,06 Persen	954.141.443	Persen	1.038.034.360				
			Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS**	**Persen**	**18,2**	**15,38**	**845.512.177**	**16,84**	**808.542.167**	**18,88**	**877.875.156**	**20,50**	**954.141.443**	**22,38**	**1.038.034.360**	**22,38**	**4.524.105.303**		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	172	190	570.512.177	207	584.362.167	232	627.875.156	252	654.141.443	275	688.034.360	1156	3.124.925.303		
		688.034.360	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	41	51	85.299.898	55	85.000.000	60	110.299.898	65	110.299.898	70	110.299.898	301	501.199.592		
		-	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	5	75.000.000	17	65.300.398	19	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	96	440.300.398		
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	8	2	96.000.000	3	119.849.490	4	103.362.979	5	129.629.266	7	163.522.183	21	612.363.918		
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	110	500.000.000		
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	64.000.000	10	64.000.000	12	64.000.000	14	64.000.000	15	64.000.000	61	320.000.000		
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	50	50.212.279	50	50.212.279	55	50.212.279	55	50.212.279	60	50.212.279	270	251.061.395		
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	50.000.000	50	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	65	50.000.000	285	250.000.000		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	12	250.000.000		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Orang	6	9	275.000.000	11	224.180.000	13	250.000.000	16	300.000.000	18	350.000.000	100,00	1.399.180.000		
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	100.000.000	5	110.000.000	5	75.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	485.000.000		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah anak terlantar ,lansia terlantar, penyandang disabilitas gelandangan dan penegemis yang memperoleh Layanan Rujukan	Orang	N/A	2	175.000.000	2	114.180.000	3	175.000.000	3	200.000.000	4	250.000.000	14	914.180.000		
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS	**Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**514790375,3**		**Persen**	**NA**	**75**	**671.426.994**	**75**	**738.569.693**	**75**	**578.847.951**	**80**	**636.732.745**	**80**	**700.406.020**	**80**	**3.325.983.402**		
			467.991.250	-				485.108.753	45 Persen	533.619.628	50 Persen	353.402.879	55 Persen	388.743.166	60 Persen	427.617.483				

			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani**	**Persen**	**NA**	**86**	**485.108.753**	**93**	**533.619.628**	**93**	**353.402.879**	**93**	**388.743.166**	**90**	**427.617.483**	**90**	**2.188.491.909**		
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang ditangani	Orang	145	20	133.500.000	30	146.850.000	30	161.535.000	30	101.156.000	25	111.271.600	135	654.312.600		
			Penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	20	43.000.000	30	47.300.000	30	52.030.000	30	57.233.000	25	62.956.300	135	262.519.300		
			Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	90.500.000	5	99.550.000	5	109.505.000	5	43.923.000	5	48.315.300	30	391.793.300		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah data fakir miskin yang valid	Orang	NA	20.000	351.608.753	20.000	386.769.628	20.000	191.867.879	20.000	287.587.166	20.000	316.345.883	20.000	1.534.179.309		
			Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	27.626	27.626	152.213.812	27.626	167.435.193	27.626	75.000.000	27.626	150.000.000	27.626	90.750.000	27.626	635.399.005		
	287.587.166,00		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	NA	5.714	99.394.941	5.714	109.334.435	5.714	75.000.000	5.714	95.719.287	5.714	96.124.556	5.714	475.573.219		
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	NA	6.091	50.000.000	6.091	55.000.000	6.091	16.867.879	6.091	16.867.879	6.091	78.811.193,41	30.455	217.546.951		
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	NA	20	50.000.000	25	55.000.000	30	25.000.000	35	25.000.000	40	50.660.134	150	205.660.134		
								186.318.241	100 %	204.950.065	100 %	225.445.072	100 %	247.989.579	100 %	272.788.537				
			Program Penanganan Bencana	**Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana**	**Persen**	**100**	**100%**	**186.318.241**	**100%**	**204.950.065**	**100%**	**225.445.072**	**100%**	**247.989.579**	**100%**	**272.788.537**	**100%**	**1.137.491.493**		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani	orang	100	1200	186.318.241	100 %	204.950.065	100 %	225.445.072	100 %	247.989.579	100 %	272.788.537	1750	1.137.491.493		
			Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5.987	5.987	49.994.000	5.987	54.993.400	5.987	60.492.740	5.987	66.542.014	5.987	73.196.215	29.935	305.218.369		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5.987	5.987	39.324.241	5.987	43.256.665	5.987	47.582.332	5.987	52.340.565	5.987	57.574.621	29.935	240.078.424		
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	5	5	34.000.000	5	37.400.000	5	41.140.000	5	45.254.000	5	49.779.400	25	207.573.400		
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Orang	NA	50	30.000.000	60	33.000.000	65	36.300.000	70	39.930.000	75	43.923.000	320	183.153.000		
			Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5.987	400	33.000.000	450	36.300.000	495	39.930.000	500	43.923.000	550	48.315.300	2.395	201.468.300		

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**			**Indeks**	**77,20**	**77,24**	**381.792.919**	**77,28**	**362.779.227**	**77,32**	**370.996.294**	**77,36**	**379.329.758**	**77,40**	**387.954.348**	**77,40**	**1.882.852.546**		
	Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**20.351.852,00**	-	**Indeks**	**83,09**	**83,44**	**166.899.401**	**83,79**	**142.876.154**	**84,14**	**144.216.885**	**84,49**	**145.576.607**	**84,84**	**146.983.831**	**84,84**	**746.552.878**		
				-				41.899.401	0.40 Persen	42.876.154	0.50 Persen	44.216.885	1.05 Persen	45.576.607	1.10 Persen	46.983.831				
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**Persen**	**0,4**	**0,4**	**41.899.401**	**0,4**	**42.876.154**	**0,6**	**44.216.885**	**0,6**	**45.576.607**	**0,7**	**46.983.831**	**0,7**	**221.552.878**		
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Perangkat Daerah	N/A	5	23.709.401	10	22.867.154	15	22.206.985	20	21.365.717	25	20.351.852	25	110.501.109		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	13.709.401	1	12.867.154	1	12.206.985	1	11.365.717	1	10.351.852	5	60.501.109		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	50.000.000		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan	Lembaga	N/A	5	18.190.000	6	20.009.000	6	22.009.900	7	24.210.890	7	26.631.979	7	111.051.769		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	Orang	25	25	18.190.000	25	20.009.000	25	22.009.900	25	24.210.890	25	26.631.979	25	111.051.769		
								50.000.000	56 %	50.000.000	57 %	50.000.000	58 %	50.000.000	59 %	50.000.000				
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**	**Persen**	**45**	**45**	**50.000.000**	**46**	**50.000.000**	**47**	**50.000.000**	**48**	**50.000.000**	**49**	**50.000.000**	**49**	**250.000.000**		
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya	Keluarga	50	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	250	250.000.000		
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	50.000.000	56 %	50.000.000	57 %	50.000.000	58 %	50.000.000	59 %	50.000.000	3,3	250.000.000		
				-				75.000.000	50 %	50.000.000	50 %	50.000.000	50 %	50.000.000	50 %	50.000.000				
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanan pembangunan**	**Persen**	**50**	**55**	**75.000.000**	**60**	**50.000.000**	**65**	**50.000.000**	**70**	**50.000.000**	**75**	**50.000.000**	**75**	**275.000.000**		
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	SKPD	N/A	5	75.000.000	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	25	275.000.000		
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	75.000.000	1	50.000.000	50 %	50.000.000	50 %	50.000.000	50 %	50.000.000	1	275.000.000		
	Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan	**Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga**			**Persen**	**NA**	**55**	**214.893.518**	**56**	**219.903.073**	**57**	**226.779.409**	**58**	**233.753.151**	**59**	**240.970.517**	**59**	**1.136.299.668**		
				-				92.003.335	70 %	94.148.103	70 %	97.092.100	70 %	100.077.800	70 %	103.167.804				

			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Persentase Kecamatan Layak Anak**	**Persen**	**9,52**	**9,52**	**92.003.335**	**9,52**	**94.148.103**	**14,2857**	**97.092.100**	**19,04762**	**100.077.800**	**23,8095**	**103.167.804**	**23,81**	**486.489.142**		
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA	Lembaga	2	2	52.003.335	2	50.148.103	2	48.692.100	2	46.837.800	2	44.603.804	10	242.285.142		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	2	2	52.003.335	2	50.148.103	2	48.692.100	2	46.837.800	2	44.603.804	10	242.285.142		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Lembaga	2	2	40.000.000	2	44.000.000	2	48.400.000	2	53.240.000	2	58.564.000	10	244.204.000		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	5	244.204.000		
				0				61.819.950	100 %	63.261.087	100 %	65.239.252	100 %	67.245.438	100 %	69.321.709				
			Program Perlindungan Perempuan	**Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan**	**Rasio**	**2**	**2**	**61.819.950**	**2**	**63.261.087**	**2**	**65.239.252**	**2**	**67.245.438**	**2**	**69.321.709**	**2**	**326.887.436**		
		61.819.950	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Orang	5	5	25.455.950	5	23.260.687	4	21.238.812	4	18.844.954	3	16.081.177	3	104.881.580		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	25.455.950	1	23.260.687	1	21.238.812	1	18.844.954	1	16.081.177	1	104.881.580		
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Orang	2	2	36.364.000	2	40.000.400	2	44.000.440	2	48.400.484	2	53.240.532	10	222.005.856		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	5	5	36.364.000	5	40.000.400	4	44.000.440	4	48.400.484	3	53.240.532	3	222.005.856		
				- 0				61.070.223	0,094 %	62.493.883	0,093 %	64.448.057	0,092 %	66.429.913	0,091 %	68.481.004				
			Program Perlindungan Khusus Anak	**Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak)**	**Rasio**	**2**	**2**	**61.070.233**	**3**	**62.493.883**	**3**	**64.448.057**	**3**	**66.429.913**	**3**	**68.481.004**	**3**	**322.923.090**		
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan	Anak	10	10	61.070.233	10	62.493.883	9	64.448.057	8	66.429.913	7	68.481.004	7	322.923.090		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	30.000.000	10	33.000.000	8	36.300.000	8	39.930.000	7	43.923.000	7	183.153.000		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	31.070.233	1	29.493.883	1	28.148.057	1	26.499.913	1	24.558.004	5	139.770.090		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasikan permaslahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Idealnya untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa Indikator, antara lain mengacu pada standar pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Karena lembaga terkait tupoksi DSP3A memiliki SPM, maka DSP3A dapat menganalisis Indikator Kinerja yang mengacu SPM. Sehingga untuk saat ini analisis terhadap kinerja pelayanan SKPD dan menggunakan IKK Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan yang terdapat pada RPJMD dan Renstra DSP3A Tahun 2021-2026.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tertentu dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan

Tabel T-C. 30

Tabel.T-C.30
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Nunukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan Tahun 2024 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	12
	Wajib										
	Sosial										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas	90	95%	85%	84%	0,99	85%	264%	3%	
	Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	6	94,42	6	6	100%	6	106,42	1774%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	94,42	5	5	1,00	5	10442%	418%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10		2	2	100%	2	4	40%	
	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	Jumlah Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	97,2	12	94,43	7,87	12	20363%	1697%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	97,2	32	94,43	295%	32	223,63	699%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	6	96,91	6	6	1,00	6	10891%	1815%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	99,98	7	7	100%	8	114,98	256%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	99,96	4	4	1,00	4	10796%	540%	

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	57.99	5	5	100%	2	64.99	500%	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	97.45	1	1	1.00	1	9945%	1989%	
Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	6	82.11	6	6	100%	6	94.11	1569%	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	21.37	1	1	1.00	1	2337%	467%	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	73.43	3	3	100%	3	79.43	530%	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	84.2	5	0	0.00	5	8920%	357%	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	82.73	1	1	100%	1	84.73	8473%	
Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	58	68.87	11	11	1.00	11	9087%	157%	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50	68.87	10	10	100%	10	88.87	178%	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8		1		0.00	1	100%	13%	
Persentase sumberdaya kesejahteraan yang diberdayakan	50	94.33	50	99.78	200%	50	244.11	488%	
Jumlah KAT yang diberdayakan	1		1		0.00	1	100%	100%	

Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10		10		0%	10	10	100%	
Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	23		3		0.00	5	500%	22%	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1		1		0%	1	1	100%	
Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	21	94.33	21	99.78	4.75	21	21511%	1024%	
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	56	79.16	11	99.06	901%	11	189.22	338%	
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	21		10		0.00	10	1000%	48%	
Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10		10		0%	10	10	100%	
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	100	5	99.93	19.99	5	20493%	3416%	
Presentase pengelolaan taman makam pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara	80		80	99.97	125%	80	179.97	225%	

Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1		1	1	1.00	67	6800%	6800%	
Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1		1		0%	1	1	100%	
Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1		1	1	1.00	1	200%	200%	
Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	100	20.25	100	75.99	76%	100	196.24	196%	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	58	20.25	10	75.99	7.60	10	10624%	183%	
Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	14%	20.25	10	75.99	760%	100	196.24	140171%	
Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS	22.38	17.83	15.38	13.07	0.85	16.84	4774%	213%	
Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1156	28.13	190	85	45%	207	320.13	28%	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	301	36.62	51	51	1.00	55	14262%	47%	

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	96	15.05	5		0%	17	32.05	33%	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21		2	0	0.00	3	300%	14%	
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	110		20	0	0%	20	20	18%	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	61		10	0	0.00	10	1000%	16%	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	270		50	48	96%	50	98	36%	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	285		50	49	0.98	50	9900%	35%	
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12		2	2	100%	2	4	33%	
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	100		9	9	1.00	11	2000%	20%	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25		5		0%	5	5	20%	

Jumlah anak terlantar ,lansia terlantar, penyandang disabilitas gelandangan dan	14	0	2	2	1.00	2	400%	29%	
Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani	90	53.59	86	85	99%	93	180.2493056	200%	
Jumlah anak terlantar yang ditangani	135	10.1	20		0.00	30	4010%	30%	
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	135	14.83	20	20	100%	30	64.83	48%	
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	0	10	10	1.00	5	1500%	50%	
Jumlah data fakir miskin yang valid	20	71.35	20,000	20000	100%	20	20091.35	100457%	
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	27626	78.82	27.626	28	1.00	27.6265	13407%	0%	
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5714	61.77	5,714	5600	98%	5,714	11375.77	199%	
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30455		6,091		0.00	6,091	609100%	20%	
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150		20		0%	25	25	17%	
Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana	100	70.48	100	84.1	0.84	100	25458%	255%	
Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani	1750		1200		0%	100	100	6%	

Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	29935	44.63	5,987	5987	1.00	5,987	1201863%	40%	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	29935		5,987		0%	5,987	5987	20%	
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	29935	84.47	5	5	1.00	5	9447%	0%	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25		50		0%	60	60	240%	
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	320	99.73	400	400	1.00	450	94973%	297%	
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0.7		0.4		0%	0.4	0.4	57%	
Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	25		5		0.00	10	1000%	40%	
Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5		1		0%	1	1	20%	

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50		50		0.00	50	5000%	100%	
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan	7		5		0%	6	6	86%	
Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25		25		0.00	25	2500%	100%	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49		45		0%	46	46	94%	
Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya	250		50		0.00	50	5000%	20%	
Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.3		1		0%	56	56	1697%	
Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanan pembangunan	75		55		0.00	60	6000%	80%	

Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	25		5		0%	10	10	40%	
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1		1		0.00	1	100%	100%	
Persentase Kecamatan Layak Anak	23.81		9.52		0%	9.52	9.52	40%	
Jumlah Lembaga PHA	10		2		0.00	2	200%	20%	
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10		2		0%	2	2	20%	
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	10		2		0.00	2	200%	20%	
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5		1		0%	1	1	20%	
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan	2		2		0.00	2	200%	100%	

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	3		5		0%	5	5	167%	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1		1		0.00	1	100%	100%	
Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	10		2		0%	2	2	20%	
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	3		5		0.00	5	500%	167%	
Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak)	3		2		0%	3	3	100%	
Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan	7		10		0.00	10	1000%	143%	
Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	7		10		0%	10	10	143%	
Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	7		1		0.00	1	100%	14%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Nunukan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi tahun 2021-2026 yakni ***MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA .*** Sejalan dengan Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak (DSP3A) agar sesuai dengan tujuan memberi manfaat bagi masyarakat umum, dan bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DSP3A, masyarakat dapat memperoleh pelayanan Publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum formal.

2.3. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PELAYANAN DSP3A BESERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1. Mengurangi beban administratif karena Pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat diwilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data *(data base)*, sehingga mengurangi beban pendataan di PD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan Pelayanan Publik karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah

2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS

3. Belum adanya Database partisipasi PPKS

4. Belum sinkronya Program Penanagan PPKS Lintas OPD.

Dalam Upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Aparatur DSP3A harus berkompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi DSP3A Kabupaten Nunukan, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu proses review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini juga dilakukan dalam rangka merasionalisasi kembali pendanaan indikatif program / kegiatan karena kebijakan keuangan daerah akibat defisit anggaran. Mudah-mudahan di tahun 2025 program / kegiatan dalam pendanaan dapat terealisasi dalam usulan rencana kerja tahun 2025.

Berikut disajikan **Tabel T-C. 31** Review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Renja DSP3A Kab. Nunukan Tahun 2025 :

Tabel.T-C. 31
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nunukan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022(thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2024(thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**85**	**85**	**90**	**90**	84%	75.00			
	Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6	6	6	6	6				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5	5	5	5	5	40			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	2	2	2				
	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah			12	12	12	12	94.43	33.33			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32	32	32	32	94.43				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6	6	6	6	6	33.33			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7	8	9	10	7				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4	4	4	4	4				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5	2	2	2	5				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	1	1	1	1				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6	6	6	6	6				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1	1	1	1				

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3	3	3	3	3	33.33			
	pengeyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5	5	5	5	0				
	Penyediaan jasa Pelayananan Umum Kantor			1	1	1	1	1	33.33			
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11	11	12	12	11	27.27			
	penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan ,dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10	10	10	10	10	30.33			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	1	2	2		91.33			
	Program Pemberdayaan Sosial			**50**	**50**	**50**	**50**	99.78	99.78			
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			1	1	1	1					
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			10	10	10	10					
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			3	5	5	5					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			1	1	1	1					
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			21	21	21	21	99.78	99.78			

	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			11	11	11	11	99.06	99.06			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			10	10	10	10					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			10	10	10	10					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			5	5	5	6	99.93	99.93			
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			**80**	**80**	**80**	**80**	99.97	99.97			
	Pemelliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	67 %	76 %	83 %	1				
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	1	1	1					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	1	1	1	1	99.97			
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			**100**	**100**	**100**	**100.00**	75.99	75.99			
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			10	10	12	12	75.99	75.99			
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			10	100 %	100 %	100 %	75.99	75.99			
	Program Rehabilitasi Sosial			**15.38**	**16.84**	**18.88**	**20.50**	13.07	57.07			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Ter;antar, serta Gelandangan pengemis diluar panti			190	207	232	252	85	55.06			
	Penyediaan Permakanan			51	55	60	65	51	83.12			

	Penyediaan Alat Bantu			5	17	19	25					
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			2	3	4	5	0				
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			20	20	20	25	0				
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			10	10	12	14	0				
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			50	50	55	55	48	88.71			
	Pemberian Layanan Kedaruratan			50	50	60	60	49	87.28			
	Pemberian Layanan Rujukan			2	2	2	3	2				
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial			9	11	13	16	9				
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			5	5	5	5					
	Pemberian Layanan Rujukan			2	2	3	3	2	66.68			
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			**86**	**93**	**93**	**93**	85	94.58			
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			20	30	30	30					
	Penjangkauan anak-anak terlantar			20	30	30	30	20				
	Rujukan anak-anak terlantar			10	5	5	5	10				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota			20,000	20,000	20,000	20,000	20000	94.58			
	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			27,626	27,626	27,626	27,626	28	97.15			
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			5,714	5,714	5,714	5,714	5600	94.51			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			6,091	6,091	6,091	6,091					
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			20	25	30	35					
	Program Penanganan Bencana			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	84.1	84.1			

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1200	100 %	100 %	100 %					
	Penyediaan makanan			5,987	5,987	5,987	5,987	5987	67.61			
	Penyediaan Sandang			5,987	5,987	5,987	5,987					
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi			5	5	5	5	5	97.97			
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			50	60	65	70					
	Pelayanan dukungan psikososial			400	450	495	500	400	96.54			
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			**0.4**	**0.4**	**0.6**	**0.6**		82.67			
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			5	10	15	20		82.67			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			1	1	1	1		82.67			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			50	50	50	50					
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			5	6	6	7					
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			25	25	25	25					
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			**45**	**46**	**47**	**48**		95.08			
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50	50	50	50		95.08			

	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			1	56 %	57 %	58 %		95.08			
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak			**55**	**60**	**65**	**70**		78.03			
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5	10	15	20		78.03			
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			1	1	50 %	50 %		78.03			
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			**9.52**	**9.52**	**14.28571429**	**19.04761905**		88.28			
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			2	2	2	2					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			2	2	2	2					
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2	2	2	2		88.28			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	1	1	1					
	Program Perlindungan Perempuan			**2**	**2**	**2**	**2**		89.33			
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			5	5	4	4					

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			1	1	1	1					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			2	2	2	2		89.33			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			5	5	4	4		89.33			
	Program Perlindungan Khusus Anak			**2**	**3**	**3**	**3**		98.96			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10	10	9	8					
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10	10	8	8					
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			1	1	1	1		98.96			

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi – asiosiasi, lembaga pendidikan maupun SKPD lainnya, merupakan bagian dari penjaringan aspirasi terkait prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembagian tahun yang direncanakan, sesuia dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dan usulan rencana program dan kegiatan di DSP3A selain diperoleh dari forum resmi musrembang tingkat kecamatan, forum SKPD juga di himpun dari saran dan masukan yang disampaikan melalui Website DSP3A maupun survey dan usulan lisan dari pengguna layanan DSP3A Kab. Nunukan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	1. Program Rehabilitasi Sosial				
	Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Nunukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp100,000,000	
	2. Program perlindungan dan jaminan sosial				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nunukan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp41,867,879	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi SKPD, Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran mengambarkan hal-hal yang ingin dicapai dari suatu tujuan melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat rasional, spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja DSP3A Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran target kinerja yang tercantum dalam Rancangan Renstra DSP3A Tahun 2021 - 2026 ditahun kedua perencanaan, yang ditetapkan berdasarkan atas telahaan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Fokus utama tujuan dan sasaran Renja DSP3A pada Tahun 2025 mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran ,Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman Maju Adil dan Sejahtera			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Bidang Sosial			
	Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan dan Pelayanan PPKS	Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS	Melaksanakan Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS	Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Pemberdayaan Sosial
		Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS	Melakukan Rehabilitasi Sosial PPKS	Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Rehabilitasi Sosial
		Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS	Melaksanakan pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS	Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak	Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan	Mendorong peran aktif perempuan terhadap Pendapatan	Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan Visi DSP3A tahun 2021 - 2026 yakni ” Visi : ““Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu”, maka program dan kegiatan yang di rancangkan pada Tahun 2025 dalam upaya mencapai misi tersebut, Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka menjalankan urusan wajib sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan untuk mencapai tujuan, sasaran serta memperhatikan strategi dan kebijakan telah disusun program kerja jangka menengah 2021 - 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Daerah. Maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Nunukan, mempunyai program kegiatan sebagai berikut

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas,maka diperlukan dukungan pendanaan yang memadahi. Anggaran yang diperlukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan guna melaksanakan Program Kegiatan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan telah menetukan program dan kegiatan pembangunan

daerah yang dituangkan kedalam Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026.

Penyajian program dan kegiatan DSP3A dilengkapi dengan indikator sampai dengan kinerja, target, pagu indikator dan lokasi untuk Tahun 2025 disajikan dalam **Tabel T-C. 33** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING (SUMBER USULAN)
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
2	3	4	5	6	7	8
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
DINAS SOSIAL				**1,972,861,674.00**		
Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase sumberdaya kesejahteraan yang diberdayakan**	**Dinas Sosial**	**50**	**50,000,000.00**	**APBD**	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang diberdayakan	Dinas Sosial	1	10,000,000.00	APBD	**Stunting**
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	10	10,000,000.00	APBD	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	Dinas Sosial	5	10,000,000.00	APBD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial	1	10,000,000.00	**APBD**	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	Dinas Sosial	21	30,000,000.00	**APBD**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Dinas Sosial	11	15,000,000.00	APBD	Kemiskinan/ penambahan target
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	10	5,000,000.00	APBD	Kemiskinan/+target
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	10	5,000,000.00	APBD	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	5	5,000,000.00	APBD	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Presentase pengelolaan taman makam pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara**	Dinas Sosial	**80**	**45,142,273**	APBD	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Dinas Sosial	67 %	45,142,273	APBD	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	25,142,273	APBD	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	20,000,000	APBD	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani**	Dinas Sosial	**100**	**50,000,000**	APBD	SPM
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial	12	50,000,000	APBD	SPM
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	100 %	50,000,000	APBD	SPM
Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS**	Dinas Sosial	**18.88**	**877,875,156**	APBD	SPM

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Ter;antar, serta Gelandangan pengemis diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial	232	627,875,156	APBD	SPM
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	60	110,299,898	APBD	SPM/Stunting/Kemiskinan
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	19	100,000,000	APBD	SPM
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	4	103,362,979	APBD	SPM
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	20	100,000,000	APBD	SPM/ Muswil
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	12	64,000,000	APBD	SPM
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	55	50,212,279	APBD	SPM
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	60	50,000,000	APBD	SPM
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	2	50,000,000	APBD	SPM
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	13	250,000,000	APBD	SPM
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	5	75,000,000	APBD	SPM
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah anak terlantar ,lansia terlantar, penyandang disabilitas gelandangan dan penegemis yang memperoleh Layanan Rujukan	Dinas Sosial	3	175,000,000	APBD	SPM
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani**	Dinas Sosial	**93**	**353,402,879**	APBD	SPM
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang ditangani	Dinas Sosial	30	161,535,000	APBD	SPM
Penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	30	52,030,000	APBD	SPM
Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	5	103,505,000	APBD	SPM
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah data fakir miskin yang valid	Dinas Sosial	20,000	191,867,879	APBD	
Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Dinas Sosial	27,626	75,000,000	APBD	KEMISKINAN
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	5,714	75,000,000	APBD	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	6,091	16,867,879	APBD	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	30	25,000,000	APBD	
Program Penanganan Bencana	**Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana**	Dinas Sosial	**100%**	**225,445,072**	APBD	SPM
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani	Dinas Sosial	100 %	225,445,072	APBD	SPM
Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	5,987	60,492,740	APBD	SPM
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	Dinas Sosial	5,987	47,582,332	APBD	SPM

	Kabupaten/Kota					

Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	5	41,140,000	APBD	SPM
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	65	36,300,000	APBD	SPM
Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	495	39,930,000	APBD	SPM
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	Dinas Sosial	**0.6**	**44,216,885**	APBD	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Dinas Sosial	15	22,206,985	APBD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	12,206,985	APBD	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	10,000,000	APBD	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan	Dinas Sosial	6	22,009,900	APBD	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Dinas Sosial	25	22,009,900	APBD	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**	Dinas Sosial	**47**	**50,000,000**	APBD	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya	Dinas Sosial	50	50,000,000	APBD	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	57 %	50,000,000	APBD	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanan pembangunan**	Dinas Sosial	**65**	**50,000,000**	APBD	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Dinas Sosial	15	50,000,000	APBD	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas Sosial	50 %	50,000,000	APBD	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Persentase Kecamatan Layak Anak**	Dinas Sosial	**14.28571429**	**97,092,100**	APBD	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA	Dinas Sosial	2	48,692,100	APBD	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Dinas Sosial	2	48,692,100	APBD	KLA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	Dinas Sosial	2	48,400,000	APBD	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	48,400,000	APBD	
Program Perlindungan Perempuan	**Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan**	Dinas Sosial	**2**	**65,239,252**	APBD	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Dinas Sosial	4	21,238,812	APBD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	21,238,812	APBD	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Dinas Sosial	2	44,000,440	APBD	

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Dinas Sosial	4	44,000,440	APBD	
Program Perlindungan Khusus Anak	**Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak)**	Dinas Sosial	**3**	**64,448,057**	APBD	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan	Dinas Sosial	9	64,448,057	APBD	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	8	36,300,000	APBD	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	28,148,057	APBD	

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kab. Nunukan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penentu kebijakan khsusunya dalam pengalokasian anggaran yang ada untuk terlaksananya Program Dan Kegiatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kab. Nunukan dengan memperhatikan aspek kontribusi kegiatan sub bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi Kabupaten Nunukan.

Namun apa yang telah direncankan dalam program dan kegiatan tahun 2025 merupakan sebagaian dari kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kab. Nunukan pada umumnya masih jauh apa yang diinginkan, maka untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang tidak menutup kemungkinan masukan dan sumbang saran dalam penyempurnaan kegiatan – kegiatan yang akan datang.

Nunukan, 26 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FARIDAH ARYANI, SE.M.A.P

NIP. 19681128 199103 2 005